



## KORUPSI

### Penyusunan Anggaran Paling Rawan

MENDAGRI Tjahjo Kumolo angkat bicara soal penetapan 38 anggota dan mantan anggota DPRD Sumut sebagai tersangka kasus korupsi. Dia prihatin, sedih, dan terpukul. "Bagaimanapun, DPRD adalah bagian dari pemerintahan. Apalagi, kasus di Sumut menyeret puluhan anggota dewan," kata dia kemarin (1/4).

◆ Ke Halaman 7 kolom 5

### Penyusunan Anggaran Paling Rawan

Sambungan dari halaman 1

Padahal, dia tak pernah bosan mengingatkan pemangku kebijakan, termasuk DPRD, untuk memahami area rawan korupsi. Salah satunya perencanaan dan penyusunan anggaran. Menurut dia, sudah banyak contoh dan kasus yang terjadi. Seharusnya itu menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak agar berhati-hati. Walaupun berkali-kali diperingatkan, masih saja ada yang bermain.

"Harus hati-hati karena area itu dicermati KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), kejaksaan, dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Perencanaan anggaran merupakan objek audit," ujar politikus PDIP itu.

Dia juga sering mengingatkan kepala daerah agar tidak bermain-main ketika menyusun anggaran dengan

DPRD. Jangan tergodanya jalan pintas. Apalagi jika jalan pintas itu berisi permintaan yang tak sesuai aturan, lebih baik ditolak. Menurut mantan anggota DPR tersebut, jika tidak ada kesepakatan antara pemerintah dan DPRD dalam pembahasan APBD, anggaran bisa disahkan lewat peraturan gubernur (pergub).

Kalau ada penyimpangan, apalagi bagi-bagi uang dalam pengesahan anggaran, permainan itu pasti terbongkar. Misalnya yang dialami puluhan anggota DPRD Sumut tersebut sekarang. "Intinya, jangan main-main. Sekali main-main, pasti kebongkar," urainya.

Tjahjo yakin, KPK tentu tidak sembarangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Komisi antirasuah tersebut pasti sudah mengantongi alat bukti kuat. Karena itu, dia minta kasus

Sumut dijadikan pelajaran. Dia menambahkan, mereka baru berstatus tersangka. Asas praduga tak bersalah harus dikedepankan.

"Sepanjang yang bersangkutan belum mempunyai penetapan hukum tetap, saya kira belum bisa diganti," ucapnya. Jika kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap, baru bisa dilakukan pergantian antarwaktu (PAW). Parpol akan menyiapkan penggantinya.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menegaskan, penetapan tersangka terhadap 38 anggota dan mantan anggota DPRD Sumut itu dilakukan bukan untuk mencari sensasi. Menurut dia, penetapan tersangka secara masal sebelumnya juga dilakukan aparat penegak hukum lain. Jumlah tersangka justru lebih banyak, yakni lebih dari 40 orang. "Di Sumbar pernah," ujarnya. (lum/tyo/c11/oki)